

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian berdasarkan temuan penelitian dapat diberikan saran untuk perbaikan yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengatasi kendala dan permasalahan dalam menerapkan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

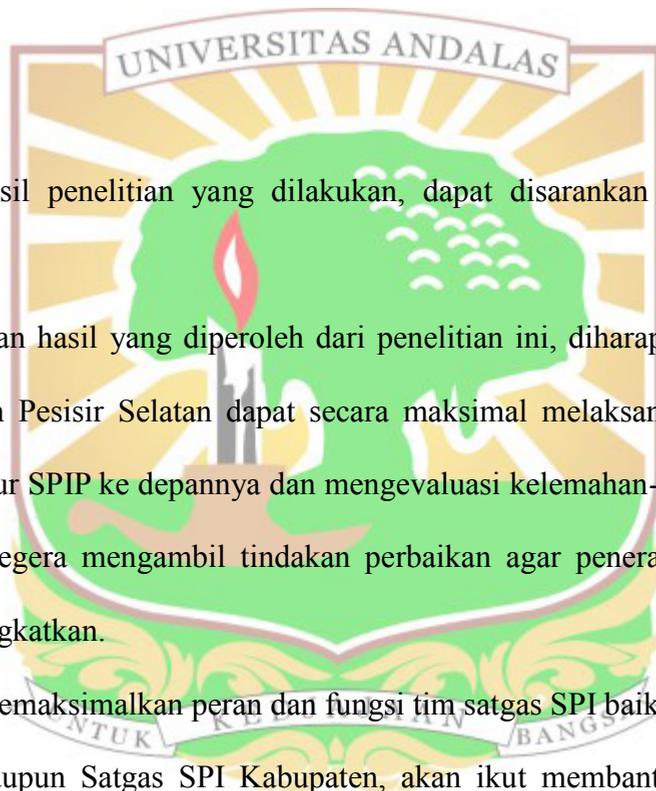
1. Hasil pengujian dengan menggunakan kertas kerja daftar uji sistem pengendalian intern diperoleh nilai 85,80% dengan nilai “Baik”.
2. Nilai 85,80% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan SPIP sesuai dengan amanah penerapan SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008. Ketidaksihesuaian penerapan SPIP menurut PP 60/2008 didapatkan sebesar 14,20%.
3. Masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerapkan SPIP diantaranya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya SPIP, belum terdapat program pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan penerapan SPIP antara lain telah menyusun dan menetapkan aturan berupa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan pedoman dan prosedur dalam meningkatkan sistem pengendalian intern.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat secara maksimal melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP ke depannya dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada dan segera mengambil tindakan perbaikan agar penerapan SPIP dapat lebih ditingkatkan.
- b. Dengan memaksimalkan peran dan fungsi tim satgas SPI baik satgas SPI pada SKPD maupun Satgas SPI Kabupaten, akan ikut membantu pemda dalam mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh setiap tahunnya, pemerintah diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengendalian intern.
- c. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan skala pengukuran lain dalam penilaian penerapan unsur-unsur SPIP



### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Hasil yang diperoleh dari kertas kerja daftar uji penilaian SPIP merupakan angka yang diperoleh dari hasil tabulasi dari kuesioner yang diisi oleh responden. Dalam memberikan nilai 1 (satu) atau 0 (nol) pada kriteria masing-masing unsur dan sub unsur SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bukan merupakan rata-rata dari penilaian kertas kerja daftar uji SPIP, melainkan peneliti mendapatkan hasil dari banyaknya jumlah responden seluruh SKPD yang memberikan jawaban yang sama. Jika responden lebih dari 50 % menjawab “ya”, maka diasumsikan hasil yang didapatkan adalah “ya” dan mendapatkan nilai 1 (satu).

